

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Teori *Stakeholder*

Stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan seringkali didefinisikan hanya sebatas pemegang saham. Friedman (1962) menyatakan bahwa tujuan utama perusahaan adalah untuk memaksimalkan kemakmuran pemiliknya sehingga pada awalnya pemegang saham dipandang sebagai satu- satunya *stakeholder* (Ghozali dan Chariri, 2007). Namun demikian, pandangan tersebut mulai berubah. Menurut Freeman, 1984 dalam Amran *et al.*, (2009) *stakeholder* adalah kelompok atau individu yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan perusahaan. Jadi *Stakeholder* bukan hanya pemegang saham tetapi juga termasuk kelompok atau individu lain yang lebih luas, diantaranya kreditur, karyawan, konsumen, pemerintah, pemasok, dan pihak- pihak lain yang terkait dengan pencapaian tujuan perusahaan.

Stakeholder theory mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Ghozali dan Chariri, 2007). Manfaat tersebut akan mendukung kepentingan *stakeholder*, sedangkan para *stakeholder* memiliki kepentingannya sendiri-sendiri. Perbedaan

kepentingan tersebut akan menimbulkan konflik yang mungkin bisa mempengaruhi pencapaian tujuan perusahaan. Karena pada dasarnya, *stakeholder theory* adalah mengenai hubungan yang dinamis dan kompleks antara perusahaan dengan lingkungan di sekitarnya, yaitu *stakeholder* (Gray *et al.*, 1996 dalam Amran *et al.*, 2009). Untuk mengatasi konflik kepentingan tersebut, perusahaan berupaya memikirkan cara yang strategis dalam menghadapinya. Ulman (1985) mengatakan bahwa organisasi akan memilih *stakeholder* yang dipandang penting, dan mengambil tindakan yang dapat mengendalikan hubungan harmonis antara perusahaan dengan *stakeholdernya* (Ghozali dan Chariri, 2007). Lebih lanjut dikatakan bahwa ketika *stakeholder* menyediakan dukungan terhadap perusahaan dengan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara memuaskan kepentingan para *stakeholdernya* (Ulman, 1985 dalam Ghozali dan Chariri, 2007). Pengungkapan yang lebih luas yaitu dengan meningkatkan penyediaan informasi merupakan salah satu cara untuk mencapai kepuasan *stakeholder*.

Salah satu kebutuhan vital *stakeholder* adalah informasi akan risiko atas kondisi perusahaan. Informasi akan risiko disampaikan perusahaan melalui pengungkapan risiko. Pengungkapan risiko sebagai salah satu praktik pengungkapan perusahaan merupakan salah satu cara perusahaan

untuk berkomunikasi dengan para *stakeholdernya* (Taures, 2010). Jika informasi risiko dapat dipahami *stakeholder* melalui pengungkapan risiko, diharapkan informasi tersebut akan memuaskan keinginan *stakeholder*. Kepuasan *stakeholder* akan berdampak dalam pengendalian sumber ekonomi sehingga menyediakan dukungan terhadap perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan. Berdasarkan teori *stakeholder*, perusahaan memiliki tingkat risiko yang tinggi akan mengungkap pembenaran dan penjelasan mengenai apa yang terjadi dalam perusahaan (Amran *et al.*, 2009). Semakin tinggi tingkat risiko perusahaan, semakin banyak pula pengungkapan risiko yang harus dilakukan perusahaan, karena manajemen perlu menjelaskan penyebab risiko, dampak yang ditimbulkan, serta cara perusahaan mengelola risiko (Linsley dan Shrivies, 2006). Semakin banyak informasi yang diungkapkan akan dipahami *stakeholder* sehingga perusahaan akan dianggap risikonya menjadi berkurang. Hal tersebut akan berdampak pada kepuasan *stakeholder*. Sehingga dapat dikatakan bahwa pengungkapan risiko berpengaruh penting pada kepuasan *stakeholder*.

2.2 Pengungkapan Resiko

Pengungkapan merupakan penyampaian informasi yang bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan. Pengungkapan memiliki tiga konsep, yaitu pengungkapan yang cukup (*adequate*), wajar (*fair*), dan lengkap (*full*) (Ghozali dan Chariri, 2007). Selanjutnya dijelaskan pengungkapan yang

cukup berarti mencakup pengungkapan minimal yang harus dilakukan agar laporan keuangan tidak menyesatkan. Pengungkapan secara wajar menunjukkan tujuan etis agar dapat memberikan perlakuan yang sama dan bersifat umum bagi semua pemakai laporan keuangan, sedangkan pengungkapan yang lengkap mensyaratkan perlunya menyajikan semua informasi yang relevan (Ghozali dan Chariri, 2007). Ketentuan atas pengungkapan informasi diatur dalam PSAK 60.

Secara garis besar PSAK 60 mengatur ketentuan atas pengungkapan instrumen keuangan dengan dua kategori sebagai berikut:

- a. Informasi mengenai signifikansi instrumen keuangan untuk posisi dan kinerja keuangan

PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi signifikansi instrumen keuangan terhadap Laporan Posisi Keuangan dan Laporan Laba Rugi Komprehensif. Selain itu entitas juga disyaratkan untuk mengungkapkan mengenai kebijakan akuntansi, akuntansi lindung nilai dan nilai wajar termasuk tingkat dalam hirarki nilai wajar.

- b. Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan

PSAK 60 mensyaratkan entitas untuk mengungkapkan informasi sehingga para pengguna laporan keuangan dapat mengevaluasi jenis dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan. Pengungkapan

informasi tersebut berupa pengungkapan kualitatif dan pengungkapan kuantitatif. Dalam pengungkapan kualitatif entitas harus mengungkapkan eksposur risiko, bagaimana risiko timbul, tujuan, kebijakan dan proses pengelolaan risiko serta metode pengukuran risiko. Sedangkan pengungkapan untuk kuantitatif entitas disyaratkan untuk mengungkapkan risiko kredit, risiko likuiditas, dan risiko pasar termasuk membuat analisa sensitivitas untuk setiap jenis risiko pasar.

Informasi mengenai sifat dan tingkat risiko yang timbul dari instrumen keuangan yang terdapat dalam PSAK No 60 sesuai dengan pernyataan Linsley dan Shrivess (2006), bahwa perusahaan dikatakan telah mengungkapkan risiko jika pembaca laporan tahunan diberi informasi mengenai kesempatan atau prospek, bahaya, kerugian, ancaman atau eksposur yang akan berdampak bagi perusahaan sekarang maupun masa mendatang. Penyampaian informasi mengenai risiko tersebut menjadi kebutuhan *stakeholder*. Pengungkapan risiko merupakan hal yang penting dalam pelaporan keuangan, karena pengungkapan risiko perusahaan adalah dasar dari praktik akuntansi dan investasi (ICAEW, 1999).

Beberapa peneliti menyatakan pentingnya dan manfaat dari pengungkapan risiko. Pentingnya dan manfaat dari pengungkapan risiko adalah:

1. Menyediakan transparansi yang lebih besar dan meningkatkan kepercayaan investor (Meier *et al.*, 1995; Solomon *et al.*, 2000;

Schrand dan Elliott, 1998; Cabedo dan Tirado, 2004; Ahmed *et al.*, 2004; Linsley dan Shrides, 2006; Abraham dan Cox, 2007; Iatridis, 2008; Linsley dan Lawrence, 2007; Spira dan Page, 2003 dalam Hassan, 2009)

2. Untuk memperbaiki *image* perusahaan dan memberi informasi kepada *stakeholder* mengenai kemampuan manajerial perusahaan dalam mengelola risiko (Iatridis, 2008 dalam Hassan, 2009)

Dapat menentukan profil risiko perusahaan, estimasi nilai pasar, dan akurasi ramalan harga sekuritas bagi investor (Beretta dan Bozzolan, 2004; Helliard dan Dunne, 2004; ICAS, 2005; Linsley dan Shrides, 2001 dalam Hassan, 2009)

3. Untuk mengurangi asimetri informasi antara manajemen dan investor serta untuk mengurangi biaya pendanaan eksternal perusahaan (Bujaki *et al.*, 1999 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007)

4. Setiap perusahaan memiliki metode yang berbeda dalam mengungkapkan risiko tergantung karakteristik yang dimiliki oleh perusahaan. Menurut Linsley dan Shrides (2006), pengungkapan risiko dalam laporan tahunan saat ini, disediakan dalam beberapa bentuk atau format, namun tidak dalam bentuk yang mudah dipahami oleh para *stakeholder*. Hal tersebut menjadi tantangan bagi manajemen untuk melakukan penyampaian informasi yang

rasional sehingga berdampak baik bagi pencapaian tujuan perusahaan.

2.2.1 Macam-macam resiko

Risiko atau Risk menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KKBI) adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan. Risiko dapat dikategorikan menjadi dua bentuk, yaitu :

- Risiko Spekulatif/Risiko Bisnis (Business Risk), adalah suatu keadaan yang dihadapi oleh suatu usaha yang dapat memberikan keuntungan dan juga dapat memberikan kerugian.
- Risiko Murni (Pure Risk), adalah sesuatu yang dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Contoh: Seorang pedagang sembako rumahan harus mengalami kerugian karena toko dan rumahnya ditenggelamkan lumpur lapindo yang kini menjadi bencana nasional. Jika ia tidak bertempat tinggal di Sidoarjo, kemungkinan usaha dan kehidupannya akan baik-baik saja.

2.2.2 Jenis-jenis resiko

Jenis-jenis risiko yang sering terjadi pada dunia usaha, antara lain risiko perusahaan, risiko keuangan, risiko likuiditas, risiko permodalan, risiko pasar, dan risiko operasional, di antaranya adalah :

- Risiko Perusahaan adalah risiko yang terjadi pada perusahaan dan akan berdampak pada kelangsungan hidup usaha tersebut. Contoh: Sebuah perusahaan mie instant mendadak dicabut izin dagangnya karena mie instant yang di produksi sudah tidak aman. Itu menyebabkan perusahaan mie tersebut ditutup.
- Risiko Keuangan adalah risiko yang berdampak kerugian pada aspek keuangan perusahaan.
- Risiko Likuiditas (Ketersediaan Uang Tunai) terjadi jika ada tagihan macet dari pelanggan yang menyebabkan terjadi permasalahan dalam ketersediaan uang tunai.
- Risiko Permodalan adalah risiko yang terjadi karena kerugian penjualan, likuiditas, dan keuangan yang membuat modal usaha mengalami penurunan secara signifikan. Contoh: Pengusaha jaket mengalami kalah saing dipasaran dan membutnya rugi total. Namun, ia memutuskan untuk menekspor produknya keluar kota. Di luar kota sendiri produknya malah tidak laku yang menyebabkannya tidak bisa balik modal, belum lagi dengan biaya ekspor barang ke luar kota yang merupakan anggaran di luar rencana.
- Risiko Pasar adalah risiko yang terjadi akibat persaingan usaha perubahan pola persaingan, daya hidup pelanggan, maupun munculnya pesaing baru yang potensial di pasar. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam pemasaran, misalnya gagal dalam mengidentifikasi pasar.

2.3 Variabel Penelitian dan Devinisi Operasional Variabel

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh tingkat profitabilitas dan corporate governance terhadap pengungkapan risiko perusahaan menggunakan laporan tahunan pada perusahaan finansial. Penelitian ini menggunakan tingkat profitabilitas, dan *corporate governance* (kepemilikan saham publik, jenis kepemilikan perusahaan) sebagai variabel independen dan kualitas pengungkapan risiko perusahaan sebagai variabel dependen. Adapun definisi operasional dari variabel tersebut:

2.3.1 Variabel Dependen

Variabel dependen (terikat) adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel independen. Variabel dependen dalam penelitian ini diwakili dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan yang terdapat pada laporan tahunan. Pengungkapan risiko merupakan pemberian informasi kepada *stakeholder* melalui laporan tahunan mengenai potensi kesempatan dan/atau hambatan maupun eksposur pada strategi, tindakan dan kinerja perusahaan yang telah atau akan berpengaruh pada perusahaan (Linsley dan Shrives, 2006).

Untuk mengukur kelengkapan pengungkapan, penelitian ini menggunakan metode indeks pengungkapan risiko atas laporan tahunan

perusahaan. Indeks pengungkapan ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui dan mengukur perbedaan dalam praktik pengungkapan antar perusahaan yang satu dengan yang lain. Semakin banyak suatu perusahaan dalam mengungkapkan risiko yang dimilikinya maka semakin ia mempunyai kemampuan untuk menghindari risiko tersebut. Indeks CRD yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada indeks yang terdapat dalam penelitian Hassan (2009) yang membagi 45 item pengungkapan menjadi 7 kelompok risiko (Lampiran A). Kelompok risiko tersebut adalah Risiko Informasi Umum, Kebijakan Akuntansi, Instrumen Keuangan, Derivatif Lindung Nilai, Cadangan, Informasi Segmen, Risiko Keuangan dan Risiko lain. Kelompok risiko mewakili pengungkapan risiko perusahaan menurut Amran et al (2009) diantaranya:

1. Risiko keuangan merupakan risiko yang berkaitan dengan instrumen keuangan perusahaan seperti risiko pasar, kredit, likuiditas, serta tingkat bunga atas arus kas. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko keuangan dikelompokkan dalam kelompok risiko keuangan dan risiko lain.

2. Risiko operasi merupakan risiko yang berkaitan dengan kepuasan pelanggan, pengembangan produk, pencarian sumber daya, kegagalan produk, dan lingkungan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko operasi juga dikelompokkan dalam kelompok risiko keuangan dan risiko lain.

3. Risiko kekuasaan merupakan risiko yang berkaitan dengan

sumberdaya manusia dan kinerja para karyawan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko kekuasaan dikelompokkan dalam kelompok risiko informasi umum.

4. Risiko teknologi dan pengolahan informasi merupakan risiko yang berkaitan dengan akses, ketersediaan, dan infrastruktur teknologi dan informasi yang dimiliki perusahaan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko teknologi dan pengolahan informasi dikelompokkan dalam kelompok risiko informasi segmen.

5. Risiko integritas merupakan risiko yang berkaitan dengan kecurangan manajemen dan karyawan, tindakan ilegal, dan reputasi.

6. Risiko strategi merupakan risiko yang berkaitan dengan pengamatan lingkungan, industri, portofolio bisnis, pesaing, peraturan, politik dan kekuasaan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko kekuasaan dikelompokkan dalam kelompok risiko informasi umum.

7. Risiko informasi akuntansi berkaitan dengan peraturan-peraturan yang mengatur kebijakan akuntansi yang dilakukan oleh perusahaan. Dalam indeks pengungkapan risiko, risiko kebijakan akuntansi dikelompokkan dalam kelompok kebijakan akuntansi, kelompok instrumen keuangan, kelompok derivative lindung nilai, dan kelompok cadangan.

Semua informasi mengenai pengungkapan risiko dalam laporan tahunan perusahaan akan sangat membantu dan dibutuhkan *stakeholders*

dalam pengambilan keputusan.

Indeks pengungkapan dalam laporan tahunan perusahaan diperoleh dengan cara sebagai berikut:

1. Metode yang digunakan adalah metode indeks pengungkapan risiko berdasarkan penelitian Hassan (2009) yaitu membandingkan isi dari laporan tahunan masing-masing perusahaan dalam daftar item pengungkapan. Indeks skor pengungkapan yang dilakukan adalah maksimum sebesar 45 (Lampiran A). Penilaian dilakukan dengan memberikan nilai 1 pada item yang diungkapkan, sedangkan nilai 0 diberikan pada item yang tidak diungkapkan.

2. Model pengungkapan yang digunakan tidak diberi bobot sehingga item pengungkapan diperlakukan sama, artinya tidak membedakan relatif pentingnya item informasi tersebut dalam pengambilan keputusan. Dalam penelitian akuntansi, baik item yang berbobot maupun yang tidak berbobot memiliki kegunaan (Hassan, 2009). Untuk tujuan dalam penelitian ini, indeks pengungkapan yang tidak berbobot dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada kelompok pengguna tertentu. Sebaliknya, penelitian ini ditujukan untuk semua pengguna dari laporan tahunan dan karena itu tidak dibutuhkan untuk membuat perbedaan tingkat kepentingan untuk item pengungkapan risiko (Oliveira *et al.*, 2006).

Batasan ketentuan item yang dianggap sebagai pengungkapan risiko yang digunakan dalam penelitian ini dikembangkan oleh Linsley

dan Shrives (2006), yaitu:

1. Kalimat yang dianggap sebagai pengungkapan risiko adalah jika pembaca diberi informasi tentang kesempatan atau prospek, atau tentang risiko, bahaya, kerugian dan hambatan, yang telah atau akan berdampak pada perusahaan di masa depan,
2. Definisi risiko tersebut dapat ditafsirkan sebagai risiko baik, risiko buruk, dan ketidakpastian,
3. Pengungkapan harus secara eksplisit dinyatakan, tidak dapat ditandakan,
4. Pengungkapan yang diulangi akan dicatat sebagai kalimat pengungkapan risiko setiap kali hal tersebut didiskusikan,
5. Jika sebuah pengungkapan terlalu samar untuk diidentifikasi, maka tidak akan dicatat sebagai pengungkapan risiko.

Untuk mengitung indeks pengungkapan risiko dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$\text{Indeks Pengungkapan Risiko (CRD)} = \left(\frac{\text{jumlah item yang diungkapkan}}{\text{total item yang diungkapkan}} \times 100\% \right)$$

2.3.2 Variabel Independen

Variabel independen (bebas) adalah variabel yang mempengaruhi atau menjelaskan variabel dependen. Variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini adalah tingkat profitabilitas dan *corporate governance* (kepemilikan

saham publik, jenis kepemilikan perusahaan). Bagian ini akan menjelaskan lebih lanjut mengenai variabel-variabel independen tersebut.

2.3.2.1 Tingkat Profitabilitas

Tingkat profitabilitas merupakan indikator keberhasilan perusahaan terutama kemampuannya dalam menghasilkan laba dengan memanfaatkan sumber-sumber yang dimilikinya seperti aset atau ekuitas (Taures, 2010). Ukuran atau proksi yang sering digunakan dalam mengukur tingkat profitabilitas diantaranya adalah:

1. Margin Laba Kotor (Gross Profit Margin)

Marjin Laba Kotor merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba kotor terhadap pendapatan yang dihasilkan dari penjualan. Laba kotor yang dipengaruhi oleh [laporan arus kas](#) memaparkan besaran laba yang didapatkan oleh perusahaan dengan pertimbangan biaya yang terpakai untuk memproduksi produk atau jasa. Marjin Laba Kotor ini sering disebut juga dengan Gross Margin Ratio (Rasio Marjin Kotor). *Gross profit margin* mengukur efisiensi perhitungan harga pokok atau biaya produksi. Semakin besar *gross profit margin* semakin baik (efisien) kegiatan operasional perusahaan yang menunjukkan harga pokok penjualan lebih rendah daripada penjualan (sales) yang berguna

untuk [audit operasional](#). Jika sebaliknya, maka perusahaan kurang baik dalam melakukan kegiatan operasional. Rumus perhitungan laba kotor sebagai berikut.

$$\text{Gros Profit Margin} = \frac{\text{Penjualan} - \text{Harga Pokok Penjualan}}{\text{Penjualan}}$$

2. Margin Laba Bersih (Net Profit Margin)

Net Profit Margin atau Marjin Laba Bersih merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase laba bersih yang didapat setelah dikurangi pajak terhadap pendapatan yang diperoleh dari penjualan. Marjin Laba Bersih ini disebut juga Profit Margin Ratio (Rasio Marjin Laba). Rasio ini mengukur laba bersih setelah pajak terhadap penjualan. Semakin tinggi *Net profit margin* semakin baik operasi suatu perusahaan. *Net profit margin* dihitung dengan rumus berikut ini.

$$\text{Net Profit Margin} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak}}{\text{Penjualan}}$$

3. Rasio Pengembalian aset (Return on Asset Ratio)

Tingkat Pengembalian Aset merupakan rasio profitabilitas untuk menilai persentase keuntungan (laba) yang

diperoleh perusahaan terkait sumber daya atau total asset sehingga efisiensi suatu perusahaan dalam mengelola asetnya bisa terlihat dari persentase rasio ini. Rumus Rasio Pengembalian Aset sebagai berikut.

$$\text{ROA} = \text{Laba Bersih} / \text{Total Aset}$$

4. Rasio Pengembalian Ekuitas (Return on Equity Ratio)

Return on Equity Ratio (ROE) merupakan rasio profitabilitas untuk menilai kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi pemegang saham perusahaan tersebut yang dinyatakan dalam persentase. *ROE* dihitung dari penghasilan (*income*) perusahaan terhadap modal yang diinvestasikan oleh para pemilik perusahaan (pemegang saham biasa dan pemegang saham preferen). *Return on equity* menunjukkan seberapa berhasil perusahaan mengelola modalnya (*net worth*) sehingga tingkat keuntungan diukur dari investasi pemilik modal atau pemegang saham perusahaan. ROE yaitu rentabilitas modal sendiri atau yang disebut rentabilitas usaha. Rumus Return On Equity sebagai berikut.

$$\text{ROE} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Ekuitas Pemegang saham}$$

5. Rasio Pengembalian Penjualan (Return on Sales Ratio)

Return on Sales merupakan rasio profitabilitas yang menampilkan tingkat keuntungan perusahaan setelah pembayaran biaya-biaya variabel produksi seperti upah pekerja, bahan baku dan lain-lain sebelum dikurangi pajak dan bunga. Rasio ini menunjukkan tingkat keuntungan yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan yang juga disebut Marjin Operasional (Operating Margin) atau Marjin Pendapatan Operasional (Operating Income Marjin). Berikut ini rumus untuk menghitung Return on Sales (ROS).

$$\text{Return on Sales (ROS)} = \frac{\text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga}}{\text{Penjualan}}$$

6. Pengembalian Modal Yang Digunakan (Return on Capital Employed)

Return on Capital Employed (ROCE) merupakan rasio profitabilitas yang mengukur keuntungan perusahaan dari modal yang dipakai dalam bentuk persentase (%). Modal yang dimaksud adalah Ekuitas suatu perusahaan ditambah kewajiban tidak lancar atau total asset dikurangi kewajiban lancar. ROCE mencerminkan efisiensi dan profitabilitas modal atau

investasi perusahaan. Laba sebelum pengurangan pajak dan bunga dikenal dengan istilah "EBIT" yaitu Earning Before Interest and Tax. Berikut ini 2 rumus Roce yang sering digunakan.

$$\text{ROCE} = \text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga} / \text{Modal Kerja}$$

atau

$$\text{ROCE} = \text{Laba Sebelum Pajak dan Bunga} / (\text{Total Aset} - \text{Kewajiban})$$

7. Return on Investment (ROI)

Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih setelah dikurangi pajak terhadap total aktiva. *Return on investment* berguna untuk mengukur kemampuan perusahaan secara keseluruhan dalam menghasilkan keuntungan terhadap jumlah aktiva secara keseluruhan yang tersedia pada perusahaan. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Rumus *Return on Investment* berikut ini.

$$\text{ROI} = \text{Laba Bersih Setelah Pajak} / \text{Total Aktiva}$$

8. Earning Per Share (EPS)

Earning per share merupakan rasio profitabilitas yang menilai tingkat kemampuan per lembar saham dalam menghasilkan laba untuk perusahaan. Manajemen perusahaan, pemegang saham biasa dan calon pemegang saham sangat memperhatikan *earning per share* karena menjadi indikator keberhasilan perusahaan. Rumus *earning per share* sebagai berikut.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Laba Bersih Setelah Pajak} - \text{Dividen Saham Preferen}}{\text{Jumlah Saham Biasa yang Beredar}}$$

Net Profit Margin (NPM) dipilih sebagai proksi tingkat profitabilitas dalam penelitian ini. *Net profit margin* digunakan untuk menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba bersih pada tiap tingkat penjualan tertentu yang dilakukan. Penggunaan NPM sebagai proksi didasarkan pada ditemukannya hubungan signifikan antara tingkat profitabilitas, yaitu *Net profit margin* dengan luas pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan perusahaan di UAE yang dilakukan Aljifri dan Hussainey (2007).

2.3.2.2 Corporate Governance

Menurut *Organization for Economic Corporation and Development/ OECD* (2004), *corporate governance* adalah suatu struktur

untuk menetapkan tujuan perusahaan, saran untuk mencapai tujuan tersebut serta untuk menentukan pengawasan atas kinerja perusahaan. Struktur dari *corporate governance* menjelaskan distribusi hak-hak dan tanggungjawab dari masing-masing pihak yang terlibat dalam sebuah bisnis, yaitu antara lain dewan komisaris dan direksi, manajer, pemegang saham, serta pihak-pihak lain yang terkait sebagai *stakeholders* (Kartika Rini, 2010). Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa setiap struktur dari *corporate governance* akan mengandung risiko karena dapat mempengaruhi operasi, tujuan, dan profit perusahaan. Selanjutnya *corporate governance* sesuai dengan teori stakeholder yang memperhatikan kepentingan pemilik dan pihak yang terkait dengan perusahaan. Dengan kata lain, *corporate governance* erat kaitannya dengan risiko yang dimiliki perusahaan sehingga diharapkan mempengaruhi pengungkapan risiko perusahaan.

Keputusan Ketua BAPEPAM dan Lembaga Keuangan Nomor KEP/134/BL/2006 Peraturan X.K.6. mengemukakan item-item *corporate governance* yang diwajibkan. Item-item *corporate governance* juga diatur di dalam Pedoman Umum Good Corporate Governance Indonesia yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG) pada tahun 2005. Berdasarkan peraturan dan pedoman tersebut, diperoleh sebanyak 16 *point item* yang terdiri dari pemegang saham; dewan komisaris; dewan direksi; komite audit; komite nominasi dan remunerasi;

komite manajemen risiko; komite-komite lain yang dimiliki perusahaan; sekretaris perusahaan; pelaksanaan pengawasan dan pengendalian internal; manajemen risiko perusahaan; perkara penting yang dihadapi oleh perusahaan, anggota dewan direksi, dan anggota dewan komisaris; akses informasi dan data perusahaan; etika perusahaan; tanggung jawab sosial; pernyataan penerapan *good corporate governance*; dan informasi penting lainnya yang berkaitan dengan penerapan *good corporate governance*.

Item struktur *corporate governance* yang dipakai di dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan saham publik dan jenis kepemilikan perusahaan.

2.3.2.2.1 Kepemilikan Saham Publik

Struktur kepemilikan saham (pemegang saham) merupakan salah satu bagian *corporate governance*. Struktur kepemilikan saham terbagi menjadi dua yaitu, kepemilikan saham internal (manajerial) dan kepemilikan saham eksternal (publik). Pihak pemilik saham internal (manajerial) adalah kepemilikan saham yang dimiliki oleh manajerial perusahaan (Sudarma, 2003). Pihak pemilik saham eksternal (publik) yang dimaksud adalah investor instutional, masyarakat luas dan sebagainya (Friend dan Hasbrouk, 1988). Karena termasuk menjadi bagian *corporate governance*, struktur kepemilikan memiliki keterkaitan dengan pencapaian tujuan perusahaan. Pernyataan tersebut memiliki arti bahwa struktur

kepemilikan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kondisi perusahaan di masa yang akan datang. Kemungkinan suatu perusahaan berada pada posisi tekanan keuangan juga banyak dipengaruhi oleh struktur kepemilikan perusahaan tersebut (Annisa, 2012).

Struktur kepemilikan saham publik mengindikasikan bahwa kepentingan perusahaan tidak hanya ada pada manajerial perusahaan tetapi secara luas ada di tangan publik. Jika dikaitkan dengan teori *stakeholder*, semakin banyak saham dimiliki oleh publik, maka perusahaan akan semakin dituntut untuk memuaskan kepentingan *stakeholder* dengan mengungkapkan informasi yang lebih luas. Hal tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Cerf dan Shinghvi dalam hardina Rosmasita (2007), struktur kepemilikan saham publik berpengaruh signifikan terhadap luas pengungkapan. Semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh publik maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan. Kondisi tersebut akan diikuti dengan tekanan yang semakin besar untuk mengungkapkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan. Formula yang digunakan untuk mencari struktur kepemilikan publik adalah :

$$\text{JSP} = (\text{jumlah saham publik} : \text{jumlah saham beredar} \times 100\%)$$

2.3.2.2.2 Jenis Kepemilikan Perusahaan

Perusahaan publik merupakan suatu perusahaan yang mempublikasikan segala informasi tentang laporan keuangan perusahaan kepada publik atau kepada masyarakat luas, sehingga masyarakat atau pihak eksternal perusahaan dapat dengan mudah memperoleh informasi tentang laporan keuangan perusahaan publik tersebut (Shinta dan Nurmala, 2012). Pada suatu perusahaan publik terdapat struktur kepemilikan perusahaan yang menunjukkan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki perusahaan. Peranan pemilik akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian tujuan perusahaan, baik berupa penentuan strategi, pengalokasian sumber daya, dan pengimplementasian strategi tersebut untuk mencapai tujuannya. Hal tersebut sesuai dengan teori *stakeholder* bahwa *stakeholder* menyediakan dukungan terhadap perusahaan dengan mengendalikan sumber ekonomi yang penting bagi perusahaan, maka perusahaan akan bereaksi dengan cara memuaskan kepentingan para *stakeholdernya* (Ulman, 1985 dalam Ghazali dan Chariri, 2007). Dengan mengklasifikasikan proporsi kepemilikan saham yang dimiliki oleh pihak individu (kepemilikan keluarga), dan pihak pemerintah (kepemilikan pemerintah), dan pihak asing (kepemilikan asing), kita bisa melihat apakah jenis kepemilikan berhubungan dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.

Jenis kepemilikan saham diantaranya adalah:

1. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen perusahaan, contohnya kepemilikan saham oleh anggota Board of Director (BOD) perusahaan. Kepemilikan saham manajerial cenderung mengindikasikan bahwa manajemen lebih merasa memiliki perusahaan. Peningkatan atas kepemilikan manajerial akan membuat kekayaan manajemen, secara pribadi, semakin terikat dengan kekayaan perusahaan sehingga manajemen akan berusaha mengurangi risiko kehilangan kekayaannya (Tamba, 2011). Struktur kepemilikan manajerial dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh manajerial yaitu presentase jumlah kepemilikan saham oleh pihak manajemen dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

2. Kepemilikan Keluarga

Kepemilikan saham oleh keluarga atau sekelompok orang yang masih memiliki relasi kerabat umumnya terdapat pada perusahaan keluarga yang diwariskan turun-temurun. Perusahaan keluarga memiliki ciri khas yaitu umumnya memiliki struktur piramida yang menunjukkan hubungan antara perusahaan induk (parent) dengan beberapa perusahaan anak (subsidiary) (Morck dan Yeung, 2003). Menurut Poza (2007) definisi dari *family bussines* bisa dilihat dari kontrol *ownership* dari dua anggota atau lebih, dari keluarga atau *partnership* dari keluarga, strategi dalam

manajemen perusahaan dipengaruhi oleh anggota keluarga baik itu sebagai *advisor* dalam anggota dewan atau menjadi pemegang saham, lebih peduli pada hubungan keluarga, yang terakhir visi dari pemilik perusahaan keluarga berlanjut sampai ke beberapa generasi.

3. Kepemilikan Pemerintah

Kepemilikan saham oleh pemerintah suatu negara umumnya terdapat pada perusahaan milik negara atau BUMN ataupun perusahaan milik negara yang sudah *go public*. Privatisasi adalah cara penjualan yang digunakan oleh pemerintah dalam menjual beberapa persen saham perusahaan milik negara kepada pihak pribadi atau pihak swasta. UU No 19 tahun 2003 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Negara, yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya dijelaskan pada butir ke 2 bahwa Perusahaan Perseroan, yang selanjutnya disebut Persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan.

4. Kepemilikan Saham oleh Pihak Asing

Kepemilikan asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-

bagiannya yang berstatus luar negeri (Aryani, 2011). Kepemilikan asing dalam perusahaan merupakan pihak yang dianggap *concern* terhadap pengungkapan pertanggungjawaban sosial perusahaan (Djakman dan Machmud, 2008). Lee (2008) berpendapat bahwa kepemilikan asing dan kepemilikan institusional lebih mampu mengendalikan kebijakan manajemen karena memiliki kemampuan dan pengalaman yang baik di bidang keuangan dan bisnis. Perusahaan yang sebagian besar sahamnya dimiliki oleh asing biasanya lebih sering menghadapi masalah asimetri informasi dikarenakan hambatan geografis dan bahasa. Oleh sebab itu perusahaan dengan kepemilikan asing yang besar akan terdorong untuk melaporkan atau mengungkapkan informasinya secara sukarela dan luas (Xiao et al., 2004). Struktur kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, dapat dirumuskan dengan presentase jumlah kepemilikan saham oleh pihak asing dibagi dengan jumlah saham yang beredar.

2.3.2.2.3 Keahlian Komite Audit

Dewan Komisaris merupakan inti dari *corporate governance* yang memiliki peran sebagai pengawas penerapan manajemen risiko untuk memastikan perusahaan memiliki program penerapan manajemen risiko yang efektif (Wulandari, 2012). Dewan Komisaris dapat mendelegasikan beberapa tugas mereka kepada komite-komite salah satunya adalah komite

audit. Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 yang menyatakan bahwa salah satu peran dan tanggung jawab Komite Audit adalah mengenai manajemen risiko dan kontrol, yaitu mengawasi proses manajemen risiko dan pengendalian perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan bahwa tugas pengawasan manajemen risiko, pada sebagian besar perusahaan, diamanatkan kepada Komite Audit untuk mencapai manajemen risiko yang sesuai (Krus dan Orowitz, 2009).

Berdasarkan Keputusan Ketua BAPEPAM No. Kep-29/PM/2004 pada tanggal 24 September 2004, anggota Komite Audit disyaratkan independen dan sekurang-kurangnya ada satu orang yang memiliki di bidang akuntansi atau keuangan. Kemudian berdasarkan pedoman *corporate governance* FCGI (2002), anggota Komite Audit harus memiliki pengetahuan yang memadai tentang akuntansi dan keuangan, serta memiliki suatu keseimbangan keterampilan dan pengalaman dengan latar belakang usaha yang luas. Selanjutnya dijelaskan bahwa latar belakang pendidikan merupakan hal penting dalam memastikan bahwa Komite Audit dapat bekerja secara efektif (Rahmat *et al.*, 2009). Hal tersebut jika dikaitkan dengan tugas komite audit dalam mengawasi manajemen risiko, satu anggota Komite Audit harus memiliki suatu keahlian keuangan dan latar belakang pendidikan untuk mengerti dan memahami tentang informasi risiko yang dihadapi oleh perusahaan. Keahlian komite audit diharapkan memiliki hubungan dengan pengungkapan risiko perusahaan.

2.3.2.2.4 Frekuensi Pertemuan Komite Audit

Artikel FCGI (2002) menyebutkan bahwa Komite Audit biasanya perlu untuk mengadakan rapat tiga sampai empat kali setahun untuk melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya yang menyangkut soal sistem pelaporan keuangan. Treadway Commission (1987) dalam Sori et al., (2007) juga menyatakan Komite Audit sebaiknya bertemu minimal empat kali dalam satu tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pertemuan komite audit merupakan hal yang penting dan berkaitan dengan pelaporan keuangan perusahaan. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Vafeas, 1999 dalam Rahmat *et al.*, 2009 yaitu efektivitas Komite Audit dalam pemenuhan tanggung jawabnya sebagai pengawas proses pelaporan keuangan dan pengendalian internal membutuhkan pertemuan yang teratur.

Pertemuan rutin meningkatkan komunikasi yang baik di dalam komite dan dapat membantu perusahaan mengambil tindakan yang tepat untuk mengurangi tingkat risiko (Tao dan Hutchinson, 2011). Pertemuan rutin akan membantu anggota komite audit untuk bertemu dan memudahkan bertukar informasi terkait dengan risiko perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa frekuensi pertemuan dapat memungkinkan risiko potensial diidentifikasi, didiskusikan, dan dihindari. Frekuensi pertemuan audit berkaitan erat dengan pengawasan laporan keuangan dan

laporan tahunan perusahaan sehingga meminimalisasi risiko yang dialami oleh perusahaan. Oleh karena itu, frekuensi pertemuan komite diharapkan menjadi sebuah faktor dalam luasnya pengungkapan informasi risiko perusahaan.

2.4 Penelitian terdahulu

Penelitian mengenai pengungkapan risiko telah dilakukan di berbagai negara. Penelitian juga dilakukan Aljifri dan Hussainey (2007) yang menguji faktor-faktor yang menentukan pengungkapan informasi *forward looking* yaitu risiko dan ketidakpastian dalam laporan tahunan perusahaan UAE. Sampel penelitian tersebut menggunakan 46 laporan tahunan perusahaan yang terdaftar di pasar keuangan Dubai atau pasar sekuritas Abu Dubai yaitu sekitar 74% dari total perusahaan yang terdaftar di akhir tahun 2004. Penelitian berfokus pada bagian naratif pada *chairman statement*, laporan CEO, dan laporan direksi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara *debt ratio* dan profitabilitas dengan pengungkapan informasi *forward looking*. Namun, jenis perusahaan dan ukuran perusahaan tidak signifikan.

Hassan (2009) juga melakukan penelitian pengungkapan risiko menguji karakteristik khusus perusahaan dalam 41 perusahaan-perusahaan di United Arab Emirates (UAE) terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Dalam penelitian tersebut ditemukan bahwa ukuran

perusahaan tidak signifikan terhadap tingkat pengungkapan risiko perusahaan, sedangkan level risiko dan tipe industri perusahaan berhubungan signifikan. Kemudian cadangan perusahaan juga ditemukan tidak berhubungan secara signifikan terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Peneliti menggunakan standar akuntansi, penelitian terdahulu, dan kerangka peraturan UAE untuk mengembangkan indeks pengungkapan risiko. Pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis regresi berganda.

Amran *et al.*, (2009) meneliti pengungkapan manajemen risiko dalam laporan tahunan 100 perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia menemukan hubungan signifikan antara ukuran perusahaan dengan pengungkapan risiko. Penelitian tersebut bertujuan untuk menyelidiki faktor-faktor yang mempengaruhi pengungkapan risiko seperti tingkat risiko perusahaan yang diwakilkan oleh strategi diversifikasi, ukuran perusahaan, jenis perusahaan, dan tingkat *leverage*. Jenis perusahaan perusahaan juga ditemukan memiliki hubungan positif dengan luas pengungkapan risiko. Peneliti menggunakan teori *stakeholder* dalam menjelaskan hubungan antar variabel. Luas pengungkapan risiko diukur dengan menggunakan *content analysis* berdasarkan jumlah kalimat yang mengandung informasi risiko.

Di Indonesia, penelitian mengenai pengungkapan risiko merupakan topik yang masih sedikit dibahas. Penelitian yang dilakukan oleh Taures

(2010) menemukan bahwa ukuran perusahaan dan jenis perusahaan berhubungan positif terhadap pengungkapan risiko, sedangkan diversifikasi produk dan geografis, tingkat leverage, serta tingkat profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh Anisa (2012) menemukan bahwa tingkat *leverage* dan ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap pengungkapan risiko. Jenis industri, tingkat profitabilitas, dan struktur kepemilikan publik tidak berhubungan signifikan dengan pengungkapan risiko perusahaan.

Penelitian yang lain hanya berfokus pada pengungkapan secara umum, yaitu pengungkapan sosial dan sukarela. Penelitian yang dilakukan oleh Anggraini (2006) menemukan bahwa kepemilikan manajemen berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. *Financial leverage*, biaya politis, dan tingkat profitabilitas tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. Kemudian dalam penelitian Almalia dan Retrinasari (2007), menemukan tingkat likuiditas, tingkat risiko perusahaan, ukuran perusahaan, dan status perusahaan memiliki hubungan positif signifikan dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan, sedangkan tingkat profitabilitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan kelengkapan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. Namun demikian, hasil yang berbeda ditemukan oleh

penelitian Sudarmadji dan Sularto (2007) bahwa ukuran perusahaan dan profitabilitas perusahaan, tingkat *leverage* dan tingkat profitabilitas memiliki hubungan negatif signifikan dengan pengungkapan informasi sukarela perusahaan.

Ringkasan dari penelitian-penelitian terdahulu mengenai karakteristik perusahaan terhadap pengungkapan informasi perusahaan dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1
Ringkasan Penelitian Terdahulu

PENELITI	JUDUL	VARIABEL	HASIL PENELITIAN
Linsley dan Shrikes (2006)	<i>Risk Reporting: A Study of Risk Disclosures in the Annual Reports of UK Companies</i>	1) Ukuran Perusahaan n 2) Tingkat Risiko Perusahaan n	(1) Ukuran perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. (2) Hanya <i>BiE Index</i> dan <i>the</i>

			<p><i>EcoValue'21TM Rating Model</i></p> <p>yang mewakili tingkat risiko perusahaan yang berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko.</p>
Aljifri dan Hussainey (2007)	<p><i>The Determinants of Forward-Looking Information in Annual Reports of UAE Companies</i></p>	<p>1) Debt Ratio</p> <p>2) Profitabilitas</p> <p>3) Ukuran Perusahaan</p> <p>4) Jenis Industri</p>	<p>(1) <i>Debt ratio</i> dan profitabilitas berhubungan signifikan dengan luas pengungkapan informasi <i>forward-looking</i>.</p> <p>(2) Jenis industri dan ukuran perusahaan tidak berhubungan</p>

			signifikan dengan tingkat pengungkapan.
Hassan (2009)	<i>UAE Corporations-specific Characteristics and Level of Risk Disclosure</i>	1) Ukuran Perusahaan n 2) Tingkat Risiko Perusahaan n 3) Tipe Industri 4) Cadangan Perusahaan	(1) Ukuran perusahaan dan cadangan perusahaan tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko perusahaan.

			(2) Tingkat risiko perusahaan dan jenis industri berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan risiko.
Amran <i>et al.</i> (2009)	<i>Risk Reporting: An Exploratory Study on Risk Management Disclosure in Malaysian Annual Report</i>	1) Tingkat Leverage 2) Ukuran Perusahaan 3) Jenis Industri	(1) Tingkat <i>leverage</i> tidak berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. (2) Ukuran perusahaan dengan jenis industri (khususnya infrastruktur dan teknologi)

			memiliki hubungan signifikan dengan luas pengungkapan risiko.
Retno Anggraini (2006)	Pengungkapan Informasi Sosial dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Informasi Sosial dalam Laporan Keuangan Tahunan	1) Kepemilikan Manajemen 2) <i>Financia</i> <i>l Leverage</i> 3) Biaya Politis 4) Tingkat Profitabilitas	(1) Kepemilikan manajemen berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi sosial perusahaan. (2) Financial leverage, biaya politis, dan tingkat profitabilitas tidak berhubungan secara signifikan dengan tingkat pengungkapan informasi sosial.

Almalia dan Retrinasari (2007)	Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan terhadap Kelengkapan Pengungkapan	1) Tingkat Likuiditas 2) Tingkat Risiko Perusahaan	1) Tingkat likuiditas, tingkat risiko perusahaan, ukuran perusahaan, dan status perusahaan memiliki
--------------------------------	--	---	---

	dalam Laporan Tahunan Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEJ	3) Tingkat Profitabilitas 4) Ukuran Perusahaan 5) Status Perusahaan	hubungan positif signifikan dengan pengungkapan laporan tahunan perusahaan. 2) Tingkat profitabilitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan pengungkapan laporan tahunan perusahaan.
Sudarmadji dan Sularto (2007)	Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Leverage, dan Tipe Kepemilikan Perusahaan terhadap Luas Voluntary Disclosure Laporan	1) Ukuran Perusahaan 2) Tingkat Profitabilitas 3) Tingkat <i>Leverage</i> 4) Tipe Kepemilikan	Ukuran Perusahaan, tingkat profitabilitas, tingkat <i>leverage</i> dan jenis kepemilikan perusahaan berhubungan negatif signifikan dengan tingkat pengungkapan.

	Keuangan Tahunan	n	
		Perusahaan	
Nazila Taures (2010)	Analisis Hubungan antara Karakteristik Perusahaan dengan Pengungkapan Risiko	1) Ukuran Perusahaan n 2) Jenis Perusahaan n 3) Diversifikasi Produk dan Geografis 4) Tingkat <i>Leverage</i> 5) Tingkat Profitabilitas	(1) Ukuran perusahaan dan jenis perusahaan berhubungan secara signifikan dengan luas pengungkapan risiko. (2) Diversifikasi produk dan geografis, tingkat <i>leverage</i> , dan tingkat profitabilitas tidak memiliki hubungan signifikan dengan luas pengungkapan risiko.

Windy Gessy Anisa (2012)	Analisis Faktor yang Mempengaruhi Pengungkapan Manajemen Risiko	1) Tingkat <i>Leverage</i> 2) Ukuran Perusahaan 3) Jenis Industri 4) Tingkat Profitabilitas	1) Tingkat <i>leverage</i> dan ukuran perusahaan berhubungan signifikan terhadap pengungkapan risiko. 2) Jenis industri,
-----------------------------	---	--	---

		5) Struktur Kepemilikan Publik	tingkat profitabilitas, dan struktur kepemilikan publik tidak berhubungan signifikan dengan pengungkapan risiko.
--	--	--------------------------------------	--

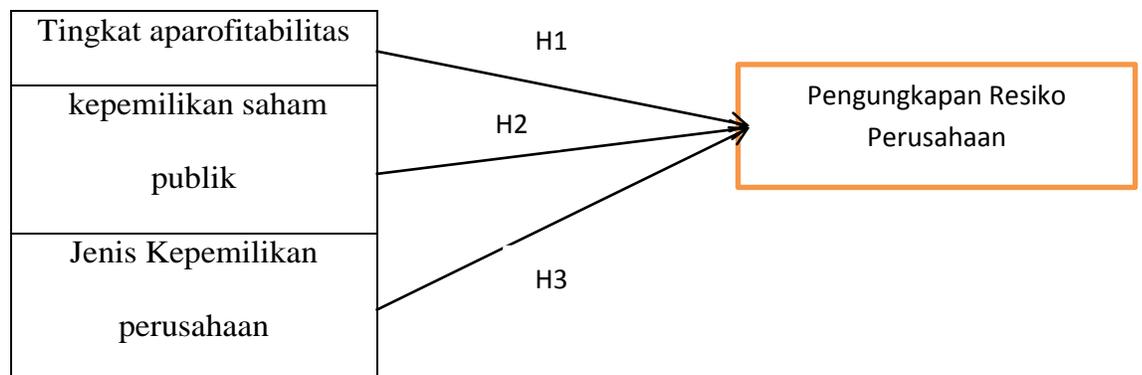
Sumber: review dari berbagai sumber

2.5 Kerangka Pemikiran

Model penelitian yang diajukan dalam gambar berikut ini merupakan kerangka konseptual dan sebagai alur pemikiran dalam menguji hipotesis.

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



2.6 Hipotesis

Hipotesis merupakan dugaan sementara yang masih harus dibuktikan kebenarannya melalui penelitian lebih lanjut. Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini diuraikan berdasarkan hubungan antara karakteristik khusus perusahaan dengan pengungkapan risiko, adalah sebagai berikut:

2.6.1 Tingkat Profitabilitas

Tingkat profitabilitas merupakan tolak ukur kemajuan perusahaan dilihat dari laba yang dihasilkan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas yang tinggi diikuti dengan risiko yang tinggi. Tingginya risiko yang dimiliki perusahaan akan mendorong perusahaan untuk mengungkapkan informasi risiko yang semakin luas. Terdapat hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas dan pengungkapan risiko karena manajer perusahaan dalam meningkatkan keuntungan dapat memberikan informasi yang lebih besar untuk meningkatkan kepercayaan investor dan dengan demikian untuk meningkatkan kompensasi mereka (Singhvi dan Desai, 1971 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007)

Perusahaan yang memiliki penurunan profitabilitas atau kerugian akan cenderung menutupi risiko yang mereka hadapi karena takut terjadinya penurunan investasi dan kepercayaan investor terhadap pengelola perusahaan. Hal ini dikarenakan rendahnya profitabilitas mengindikasikan tingginya risiko yang dihadapi perusahaan (Barry dan

Brown, 1986; Prodhon dan Harris, 1989 dalam Aljifri dan Hussainey, 2007). Hubungan yang positif antara tingkat profitabilitas dengan luas pengungkapan informasi *forward-looking* dalam laporan tahunan perusahaan di UAE ditemukan dalam penelitian yang dilakukan Aljifri dan Hussainey (2007). Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

H1: Tingkat profitabilitas berpengaruh positif terhadap tingkat pengungkapan resiko perusahaan

2.6.2 Kepemilikan Saham publik

Pemilik saham eksternal (publik) adalah pemilik saham di luar pemilik manajerial. Pihak-pihak yang dimaksud meliputi investor institutional, masyarakat luas dan sebagainya (Friend dan Hasbrouk, 1988). Menurut *Stakeholder theory* mengatakan bahwa perusahaan bukanlah entitas yang hanya beroperasi untuk kepentingannya sendiri namun harus memberikan manfaat bagi *stakeholdernya* (Ghozali dan Chariri, 2007). Semakin banyak saham yang dimiliki publik, maka semakin banyak *stakeholder* yang harus merasakan manfaat dalam hal laporan keuangan maupun tahunan oleh perusahaan. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pihak perusahaan semakin dituntut untuk memberikan laporan yang transparan sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap investor.

Penelitian mengenai struktur kepemilikan saham publik yang dikaitkan dengan luas pengungkapan menunjukkan hasil yang signifikan

dalam penelitian yang dilakukan oleh Cerf dan Shinghvi dalam Hardina Rosmasita (2007). Semakin banyaknya saham yang dimiliki oleh publik maka semakin banyak pihak yang membutuhkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan. Kondisi tersebut akan diikuti dengan tekanan yang semakin besar untuk mengungkapkan informasi risiko yang dihadapi perusahaan. Penelitian yang dilakukan Retno Angraini (2006), menemukan pengaruh yang signifikan antara struktur kepemilikan manajemen berpengaruh terhadap pengungkapan sosial perusahaan. Berdasarkan analisis dan temuan penelitian diatas, maka hipotesis penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

H2: Struktur Kepemilikan Saham Publik Berpengaruh Positif terhadap
Pengungkapan Risiko Perusahaan

2.6.3 Jenis kepemilikan Perusahaan

Jenis kepemilikan perusahaan menunjukkan keterlibatan perusahaan ke dalam strategi tertentu sesuai dengan karakteristik pemilik perusahaan. Perusahaan-perusahaan dengan jenis kepemilikan yang sama akan cenderung untuk menunjukkan level pengungkapan risiko yang sama dalam tujuan untuk mencegah apresiasi negatif oleh pasar. Hassan (2009) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan yang bekerja dalam lingkungan sosial politik yang sama, cenderung untuk mengadopsi strategi pelaporan yang sama karena memiliki tekanan legal dan profesional yang sama. Hal tersebut juga berlaku pada jenis kepemilikan perusahaan. Jenis

kepemilikan yang sama akan cenderung mengadopsi strategi pelaporan yang sama karena memiliki sistem yang sama untuk memakmurkan kekayaan pemiliknya. Pernyataan tersebut juga didukung oleh Amran *et al.* (2009), yang menyatakan bahwa perusahaan yang beroperasi pada industri yang berbeda mungkin berpengalaman dalam menghadapi jenis risiko yang berbeda-beda. Hal ini dikarenakan perusahaan-perusahaan tersebut menghadapi kegiatan usaha, peraturan, kebijakan akuntansi, pengukuran, penilaian, dan teknik pengungkapan yang berbeda sesuai dengan karakteristik industrinya, yang akan menghasilkan pula perbedaan tingkat pengungkapan perusahaannya (Aljifri dan Hussainey, 2007; Amran *et al.*, 2009).

Penelitian mengenai hubungan jenis kepemilikan perusahaan dengan pengungkapan risiko belum pernah dilakukan sebelumnya. Penelitian-penelitian telah dilakukan sebelumnya menguji pengaruh karakteristik industri atau jenis perusahaan terhadap level pengungkapan risiko perusahaan. Hassan (2009) menemukan bahwa jenis perusahaan yang dibagi menjadi perusahaan keuangan dan non keuangan, berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan risiko perusahaan. Amran *et al.*, (2009). Juga menemukan bahwa karakteristik industri berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan. Dengan asumsi perlakuan industri yang sama akan memiliki persamaan tindakan dengan jenis kepemilikan perusahaaan, maka penelitian ini melihat apakah jenis

perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut,

H3 : Jenis kepemilikan perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan risiko perusahaan